

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagaimana dalam UU No. 24 Tahun 2007 yang berbunyi bahwa, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹ Sehingga dapat disimpulkan darinya menjadi 3 jenis penggolongan bencana, yakni bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial.

Di Pamekasan sendiri, bencana alam yang menjadi rutin terjadi setiap tahunnya adalah banjir yang disebabkan oleh meluapnya air dari sungai yang tidak mampu menampung debit air. Baik dikarenakan curah hujan tinggi ataupun air kiriman yang tidak dapat tertampung oleh sungai dengan sedimentasi tinggi yang tidak kunjung mendapatkan tindakan².

Tercatat bencana Banjir yang terjadi di Pamekasan dari kurun waktu tahun 2013-2017 terjadi di 24 desa, dengan rincian tahun 2013 banjir terjadi di 10 desa meliputi tiga kecamatan, ditahun 2014 terjadi di dua kecamatan dengan 8 kali kejadian 2015, terjadi 4 kali kejadian Banjir, tahun 2016 1 kali kejadian dan 2017

¹Admin BPBD Kabupaten Pamekasan, *Profil BPBD Kabupaten Pamekasan: Ruang Lingkup*, BPBD Kabupaten Pamekasan, diakses dari <https://bpbd.pamekasankab.go.id/> pada tanggal 10 April 2022.

² Samsul Arifin, "Langkah Antisipasi Banjir di Pamekasan Sebatas 'Wacana'", Berita Jatim.com, diakses dari <https://beritajatim.com/sorotan/langkah-antisipasi-banjir-di-pamekasan-sebatas-wacana/>, pada 30 Januari 2023.

2 kali kejadian.³ Kemudian pada 2 Maret 2022 tercatat sebanyak 6.329 kepala keluarga, 10 kelurahan dan desa, serta 5 kecamatan menjadi terdampak banjir.⁴ Di antaranya di Pamekasan sebanyak 4.612 KK atau 10.371 jiwa, sementara di Desa Pademawu ada 6 desa yang terdiri dari Desa Sumedangan, Desa Lemper, Desa Durbuk, Desa Kretek, Desa Majungan dan Desa Buddagan dengan rata-rata masyarakat terdampak sebanyak 3.500 jiwa. Sehingga total korban terdampak mencapai 13.871 jiwa⁵.

Pada bulan Maret 2022 lalu, daerah terdampak tersebar di Kelurahan Jungcangcang, Patemon, Parteker, Barurambat, Kelurahan Kangenan, lalu Desa Laden, Desa Nyalabuh Laok, Samiran dan desa kodik. Di Kelurahan Jungcangcang sebanyak 2.316 KK, Patemon 1.226 KK. Parteker 912 KK, Barurambat 300 KK, Gladak Anyar 30 KK, dan di Kelurahan Kangenan sebanyak 600 KK. Selanjutnya di Desa Laden sebanyak 800 KK, Desa Nyalabuh Laok 30 KK, lalu Desa Samiran sebanyak 15 KK dan di Desa Kodik sebanyak 100 KK.⁶

Cakupan banjir yang mulanya hanya terjadi pada beberapa daerah, semakin tahun menjadi semakin luas untuk daerah terdampak, dengan tahun 2022 yang menjadi banjir terbesar dan terparah di Pamekasan akibat dari luapan sungai

³Qaiyim Asy'ari, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan: Studi Kasus Banjir, Kekeringan dan Longsor 2007", *Journal Of Management and Accounting 1*, No. 02 (Oktober 2018), 166, <https://doi.org/10.52166/J-Macc.V1i2.1186>.

⁴Nurul Fitriana, "BPBD: Ribuan KK di 10 Kelurahan dan Desa di Pamekasan Jawa Timur Terdampak Banjir," Kompas TV, Diakses Dari <https://www.kompas.tv/article/266523/bpbd-ribuan-kk-di-10-kelurahan-dan-desa-di-pamekasan-jawa-timur-terdampak-banjir> Pada Tanggal 11 April 2022.

⁵Peni Widiarti, "Banjir Pamekasan, Ada 13.721 Warga yang Terdampak", *Bisnis.com*, diakses dari <https://surabaya.bisnis.com/read/20220302/531/1506256/banjir-pamekasan-ada-13721-jiwa-yang-terdampak-pada-30-januari-2023>.

⁶Antara, "BPBD Pamekasan Sebut 6.329 Kepala Keluarga Jadi Korban Terdampak Banjir", *Tempo.co*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1566207/bpbd-pamekasan-sebut-6-329-kepala-keluarga-jadi-korban-terdampak-banjir> pada 16 Februari 2023.

Kalikloang dan Kalisemajid⁷. Peristiwa ini merugikan masyarakat yang kurang siaga bencana banjir pada beberapa daerah yang baru terdampak banjir dibanding daerah yang sudah sering terdampak sebelumnya, dengan kerugian dan permasalahan baru, ditambah berbarengan dengan pemadaman terjadwal listrik akibat perbaikan kabel di jembatan Suramadu sejak Sabtu, 26 Februari 2022.

Penanganan bencana membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam membantu korban, mendorong berbagai golongan masyarakat ikut adil dalam menanggulangi bencana banjir bersama. Pemerintah mempunyai bagian khusus untuk menangani penanggulangan bencana yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dibentuknya badan khusus adalah semata-mata untuk mendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk dapat melewati bencana alam berupa banjir yang tidak dapat dipungkiri dapat terjadi kembali dengan kerugian seminim mungkin. Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan perlu mempersiapkan diri, dengan membangun kerja sama sehingga dapat berkoordinasi dalam penanggulangan bencana guna mengoptimalkan tugas BPBD Kabupaten Pamekasan yang meliputi penetapan kebijakan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BPBD Kabupaten Pamekasan adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. BPBD bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana

⁷ Mohammad Fatoni, "Bencana Banjir Terparah dalam 55 Tahun di Pamekasan, Aktivitas Warga Lumpuh," *Tribun Jogja.com*, Diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/2022/03/01/bencana-banjir-terparah-dalam-55-tahun-terakhir-di-pamekasan-aktivitas-warga-lumpuh> Pada 30 Januari 2023.

secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. BPBD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk berkoordinasi dengan semua perangkat daerah, lembaga atau pihak lainnya dalam menanggulangi pra, pada saat, dan pasca bencana. Lembaga atau pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana dan memberikan bantuan ini meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Kepolisian, Perusahaan Umum (PU), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Pasal 9 mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik berkaitan dengan kegiatan dan kinerja setidaknya 6 bulan sekali⁸. Dalam bagian kedua pasal 10 terkait informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, mengenai informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum harus disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami⁹.

Mengikuti isi undang-undang di atas, menginformasikan seputar bencana menjadi bagian dari informasi publik yang harus disampaikan baik secara berkala ataupun secara langsung dan serta-merta kepada masyarakat melalui media paling mudah dijangkau. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai setiap bentuk kegiatan dan kebijakan BPBD Kabupaten Pamekasan pada setiap

⁸ Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2008) 7.

⁹ Ibid 8.

tahapan baik pra-bencana, saat bencana terjadi ataupun pasca dalam menghadapi banjir yang terjadi di Pamekasan.

Cara penanganan bencana menggunakan model komunikasi CERC (*Crisis and Emergency Risk Communication*) juga perlu dipertimbangkan. Dikarenakan CERC memiliki rancangan strategi komunikasi dalam setiap tahapan krisis atau yang mereka sebut sebagai *Crisis Communication Lifecycle* (CCL) yang tidak jauh berbeda dengan tahapan komunikasi bencana namun lebih detail dan praktis. Dalam *lifecyle* ini, mereka membagi sebuah krisis ke dalam lima tahapan mulai dari prakrisis (*precrisis*), awal (*initial*), pemeliharaan (*maintenance*), resolusi (*resolution*) sampai dengan evaluasi (*evaluation*), kemudian mereka merinci apa saja yang perlu dilakukan dari sisi komunikasi di setiap tahapan tersebut.

Komunikasi bencana memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, baik itu oleh pihak pemerintah seperti BPBD ataupun masyarakat. Masyarakat juga harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Sebagaimana ungkapan CDC (Centers for Disease Control) bahwa *the right message at the right time from the right person can save lives* atau pesan yang benar di saat yang tepat, dari orang yang tepat dapat menyelamatkan kehidupan.

Datangnya musim hujan serta sedimentasi sungai dan kali yang tinggi pada beberapa sungai Kabupaten Pamekasan, terutama sungai yang besar yang kerap kali tidak dapat menampung debit air menjadi penyebab meluapnya air sehingga terjadi banjir. Pencegahan terjadinya bencana banjir di Kabupaten Pamekasan, diperlukan sebuah upaya komunikasi bencana yang efektif guna menyadarkan masyarakat

akan urgensi mempersiapkan diri serta pemerintah untuk menanggulangi bencana banjir.

Komunikasi bencana memegang peranan penting untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, oleh BPBD Kabupaten Pamekasan, pihak pemerintah daerah ataupun masyarakat. Masyarakat juga perlu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana. Komunikasi bencana diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada semua lini tentang pencegahan dan penanganan bencana.

Berawal dari rincian peristiwa di atas, dalam rencana penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana bentuk dan efektivitas komunikasi bencana yang dijalankan BPBD Pamekasan dalam upaya mengoptimalkan komunikasi bencana sebagai penunjang keberhasilan manajemen bencana, dengan acuan peristiwa berupa banjir pada Maret 2022 yang terjadi di daerah Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka beberapa fokus penelitian yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk komunikasi bencana BPBD Pamekasan dalam menanggulangi bencana banjir di Pamekasan?
2. Bagaimana efektivitas komunikasi bencana yang digunakan BPBD Pamekasan dalam menanggulangi bencana banjir?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengumpulkan fakta yang terjadi di lapangan, menganalisis serta mengambil gambaran untuk memberikan titik terang dalam pembahasan mengenai optimalisasi komunikasi bencana BPBD Pamekasan dalam penanggulangan bencana banjir yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk komunikasi BPBD Pamekasan dalam mengoptimalkan komunikasi bencana guna menanggulangi banjir tahunan yang terjadi di Pamekasan.
2. Untuk mengkaji efektivitas komunikasi bencana yang digunakan oleh BPBD Pamekasan dalam menanggulangi bencana banjir tahunan di Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat yakni:

a. Manfaat teoritis

Agar penelitian ini dapat menjadi referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya dengan topik atau tema komunikasi bencana dan manajemen bencana. Baik di daerah Pamekasan ataupun daerah dengan permasalahan banjir lainnya. Dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap cara komunikasi bencana BPBD Pamekasan dalam mengoptimalkan penanggulangan bencana banjir di Pamekasan.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dalam menanggulangi risiko terjadinya bencana banjir, khususnya di

Kabupaten Pamekasan yang akan dihadapkan pada tugas serta tantangan mendatang yang lebih beragam lagi. Diharapkan agar penelitian ini menjadi bahan bacaan sebagai referensi di perpustakaan kampus IAIN Madura dan sebagai sarana informasi sebagai tambahan ilmu yang dapat berguna bagi pembaca. Serta menjadi bahan acuan penelitian lebih lanjut pada perkembangan masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin.¹⁰ Memikirkan cara terbaik, menerapkannya, lalu mengevaluasi hasil dari cara yang dipakai menjadi praktik optimalisasi yang bisa dipakai untuk menunjang sebuah keberhasilan tujuan organisasi.

2. Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 tentang penanggulangan bencana, definisi bencana adalah peristiwa maupun rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pengertian bencana secara umum yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan berupa sarana-prasarana maupun struktur sosial yang

¹⁰ Editorial Tim, “*Optimalisasi Adalah? Pengertian, Manfaat, & Contoh Optimalisasi*”, KBII Digital, diakses dari <https://www.kbbi.divedigital.id/2020/09/apa-itu-optimalisasi-pengertian-manfaat.html> pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 20.41 WIB.

sifatnya mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.¹¹ Bencana juga dapat diartikan secara lebih rinci sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.¹²

Dapat disimpulkan bahwa bencana menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dengan kerugian materi dan non-materi, baik yang disebabkan oleh alam dan juga manusia. Bencana juga menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa diprediksi apakah akan terjadi atau tidak secara pasti.

Menurut Nurjanah bencana terjadi dikarenakan adanya keterkaitan antara bahaya, kerentanan dan pemicu. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana seperti dekat aliran sungai, menyadari bahwa kehidupan mereka tidak selamanya berada dalam tingkat aman, tetapi bisa saja terjadi sebuah bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan kerentanan, dimana masyarakat harus mengerti bagaimana karakteristik dari bahaya tersebut. Kedua hal tersebut, bahaya dan kerentanan berkaitan dengan pemicu seperti, hujan deras yang menyebabkan sungai tidak mampu menampung air lebih banyak lagi. Maka masyarakat yang bertempat tinggal di dekat aliran sungai tersebut berpotensi terkena bencana banjir.

¹¹Edelweis Lararenjana, “*Ketahui Pengertian Bencana Alam Beserta Jenis dan Mitigasinya: Perlu Dipelajari*”, Merdeka.com, diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 21.33.

¹² Sutopo Purwo Nugroho, Dyah Sulistyorini, *Komunikasi Bencana: Membedah Relasi BNPB Dengan Media*, (Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat, t.t.) 74-75.

3. Komunikasi Bencana

Menurut Lestari (2018) Komunikasi Bencana adalah proses pembuatan, pengiriman dan penerimaan pesan oleh satu orang atau lebih, secara langsung maupun melalui media, dalam konteks kebencanaan pada saat prabencana, saat terjadi bencana, pasca bencana dan menimbulkan respons ataupun umpan balik¹³.

Dalam menghadapi sebuah bencana, cara penanggulangan yang baik dapat menjadi jalan keluar bersama. Sedangkan komunikasi bencana sendiri merupakan cabang ilmu komunikasi yang fokus pembahasannya mengenai penyampaian informasi seputar bencana, baik pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana terjadi. Melalui serangkaian proses komunikasi mulai tahap pencegahan sampai penanggulangan.

4. BPBD Pamekasan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan merupakan lembaga yang bertugas untuk menangani bencana, mulai dari kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, sampai pada tahap rekonstruksi yang berkolaborasi dengan masyarakat setempat guna mencapai tujuan kenyamanan bersama. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Pamekasan, mempunyai tugas

¹³ Mochamad Iqbal, Vikry Abdullah Rahiem, Charisma Asri Fitrananda, dan Yogi. M. Yusuf, "KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA: Studi Kasus Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jabar dalam Menghadapi Bencana Alam Gempa Bumi Akibat Sesar Lembang, *jurnal ilmu komunikasi* 8, No. 2 (Juli, 2021): 189, <https://doi.org/10.23969/linimasa.v4i2.4189>.

membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang penanggulangan bencana daerah.

5. Penanggulangan Bencana Banjir

Penanggulangan bencana adalah kegiatan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir. Kegiatan ini tidak hanya berlaku pada saat bencana terjadi, namun juga berupa kegiatan melakukan persiapan yang baik guna meminimalisir kerugian saat bencana terjadi. Penyesuaian diri terhadap bencana banjir dengan sikap yang positif dan produktif, sehingga meningkatkan adaptasi masyarakat yang baik terhadap bencana banjir. Sehingga Bencana banjir yang sudah menjadi rutin setiap tahunnya menjadi permasalahan yang ditanggulangi dengan baik, untuk membentuk masyarakat yang siaga dan sigap akan bencana. Serta penanggulangan pasca bencana untuk memperbaiki kondisi dan kerugian sekaligus menjadi tahap evaluasi terhadap cara menghadapi dan persiapan yang digunakan sebelumnya, guna mengoptimalkan komunikasi bencana.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung dalam kesuksesan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait judul penelitian Optimalisasi Komunikasi Bencana BPBD Pamekasan dalam Penanggulangan Bencana Banjir. Dimana peneliti membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti.

Menurut penelitian Sunnora Meilisa Kaharjono dengan judul skripsi “Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang dalam

Pengurangan Risiko Erupsi Gunung Merapi”¹⁴ tahun 2018 dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa salah satu program penanggulangan BPBD Magelang berupa *sister village* yang mengusung konsep evakuasi kepada tempat yang sudah disediakan saat terjadinya bencana erupsi. Konsep ini mempermudah pengungsi untuk mendapatkan kepastian tempat untuk evakuasi sementara yang disepakati bersama dengan MoU serta memberikan rasa nyaman dengan membangun ikatan kebersamaan dan membentuk hubungan harmonis antar desa. Tidak hanya itu, *sister village* juga dilengkapi dengan sistem pendukung berupa *website* informasi desa untuk mempermudah saat proses evakuasi ataupun pengungsian dan Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (ORPB) berupa warga desa yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana erupsi Merapi.

Perbedaan penelitian Sunnora dengan penulis terletak pada tujuan penelitian, Sunnora mengambil fokus pada satu tahap manajemen bencana yakni tahap mitigasi dengan menjabarkan program yang dilakukan BPBD Magelang dalam mempersiapkan masyarakat sebelum terjadinya bencana.

Penelitian kedua berupa skripsi berjudul “Komunikasi Bencana dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kawasan PLTA Koto Panjang, Kampar, Riau”¹⁵ yang ditulis oleh Pipit Barato Vanesza pada tahun 2018 dimana dalam penelitiannya disebutkan, BPBD juga menerapkan program BNPB berupa Desa Tangguh Bencana (DESTANA) kepada dua desa paling terdampak untuk memberikan informasi terkait penanggulangan pada saat bencana datang. BPBD juga bekerja sama dengan

¹⁴ Sunnora Meilisa Kaharjono, “*Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang dalam Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Merapi*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9674>.

¹⁵ Pipit Barato Vanesza, “*Komunikasi Bencana dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kawasan PLTA Koto Panjang, Kampar, Riau*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9952>.

instansi lainnya untuk mengoptimalkan penanggulangan dengan cepat dan baik. Penyebaran informasi dengan memanfaatkan media sosial juga dioptimalkan sebaik mungkin dalam pendistribusian pesan. Dengan total terdapat 3 pola komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat yaitu, pola komunikasi rantai dan pola komunikasi roda pada saat pra bencana, pola komunikasi roda dan pola komunikasi Y pada saat tanggap darurat, dan pola komunikasi rantai pada saat pasca bencana.

Perbedaan penelitian Pipit dengan penulis terletak pada tujuan penelitian, yang mana Pipit membahas pola komunikasi dan koordinasi antara BPBD Kabupaten Kampar dengan berbagai pihak yang terkait pada saat penanggulangan bencana banjir dalam penelitiannya.

Penelitian ketiga berupa jurnal tahun 2018 berjudul Optimalisasi Komunikasi Bencana dalam Mengurangi Kabut Asap di Provinsi Riau yang ditulis oleh Rohayati dan Nur Alhidayatillah¹⁶ yang memaparkan data penelitian berupa pelaksanaan komunikasi bencana BPBD Riau yang dijalankan secara optimal dibuktikan melalui fungsi komunikasi bencana dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah memenuhi empat syarat implementasi komunikasi bencana yaitu *costumer focus*, *leadership commitment*, *situational awareness*, dan *media partnership*. Kemudian dilihat berdasarkan bentuk-bentuk komunikasi bencana oleh BPBD Provinsi Riau dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu: kegiatan jangka pendek, kegiatan jangka menengah, dan kegiatan jangka panjang oleh BPBD Provinsi Riau. Ketiga bentuk

¹⁶ Rohayati Rohayati , Nur Alhidayatillah, "Optimalisasi Komunikasi Bencana dalam Mengurangi Kabut Asap di Provinsi Riau," Jurnal Simbolika April 6, no. 3 (April, 2020), 10.31289/simbollika.v6i1.2865.

kegiatan ini merupakan implementasi komunikasi bencana yang telah dilaksanakan secara penuh oleh BPBD Provinsi Riau.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu di atas adalah lokasi penelitian, lalu konsentrasi bencana yang diteliti penanganannya. Sedangkan untuk persamaannya adalah analisis komunikasi bencana yang diteliti akan melibatkan pola komunikasi yang dijalankan, bentuk komunikasi dan cara komunikasi yang dilakukan untuk menangani bencana. Selain itu tujuan yang sama dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan cara komunikasi bencana yang dijalankan BPBD dalam menanggulangi bencana.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis pelajari, penulis mendapatkan bahwa proses komunikasi menjadi titik penting untuk mempersiapkan masyarakat siap dan siaga bencana.

Dalam penelitian ini penulis akan mengobservasi data yang berasal dari kegiatan, laporan serta perencanaan BPBD Pamekasan dan fakta lapangan yang ada melalui wawancara sesuai dengan teori dan tahapan komunikasi bencana.